

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI
WUJUD HAK WARGA NEGARA INDONESIA
ANANDA SAUSANTI MEDANTIMI**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai wujud pemenuhan hak warga negara, khususnya dalam merespons berbagai risiko dan tantangan akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, observasi terstruktur, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle yang mencakup aspek konten dan konteks kebijakan, serta analisis pemangku kepentingan dari Rachel Thompson untuk mengidentifikasi dan menilai pengaruh aktor-aktor utama dalam proses kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya belum berlangsung secara optimal. Beberapa elemen penting seperti pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, penunjukan petugas pelindung data pribadi (DPO), kerja sama internasional terkait tata kelola data lintas batas, serta edukasi publik belum terlaksana secara menyeluruh. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan lemahnya penegakan regulasi turut menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Penelitian ini menekankan pentingnya upaya kolaboratif antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar perlindungan data pribadi dapat diwujudkan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai hak dasar setiap warga negara. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana tata kelola digital dan hak asasi manusia di Indonesia dengan menyajikan perspektif ilmu politik tentang bagaimana kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pelindungan Data Pribadi (PDP), Hak Warga Negara

**IMPLEMENTATION ABOUT PUBLIC POLICY IN DATA PRIVATION FOR
FULFIEL RIGHTS IN INDONESIA PEOPLE
ANANDA SAUSANTI MEDANTIMI**

ABSTRACT

This research examines the implementation of personal data protection policies in Indonesia as a form of fulfillment of citizens' rights, especially in responding to various risks and challenges due to the rapid development of digital technology. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant stakeholders, structured observations, and documentation studies. The analysis was conducted using Merilee S. Grindle's theory of public policy implementation that covers aspects of policy content and context, as well as Rachel Thompson's stakeholder analysis to identify and assess the influence of key actors in the policy process.

The results show that although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has been passed, its implementation has not taken place optimally. Some important elements such as the establishment of an independent data protection authority, the appointment of a personal data protection officer (DPO), international cooperation related to cross-border data governance, and public education have not been implemented thoroughly. In addition, overlapping authority between institutions and weak enforcement of regulations have also become obstacles to the effective implementation of this policy.

This research emphasizes the urgency of collaborative efforts among government agencies, civil society, and private entities to ensure that personal data protection is realized not only as a legal obligation but also as a fundamental right of every citizen. The study contributes to the discourse on digital governance and human rights in Indonesia by offering a political science perspective on how public policies should adapt to technological transformation and safeguard democratic values.

Keywords : *Public Policy Implementation, Personal Data Protection, Citizens' Rights*